

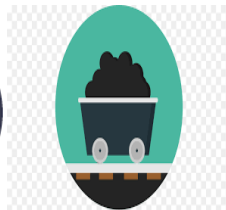


KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

DUKUNGAN FISKAL DAERAH DALAM MENGEMBANGKAN EBT

Dr. Joko Tri Haryanto

**Peneliti Madya, Pusat Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim dan
Multilateral, Badan Kebijakan Fiskal**



Jakarta, 19 Mei 2020

WEBINAR : Green Economic Recovery



KONDISI DAERAH



Kaya SDA



Daerah Miskin

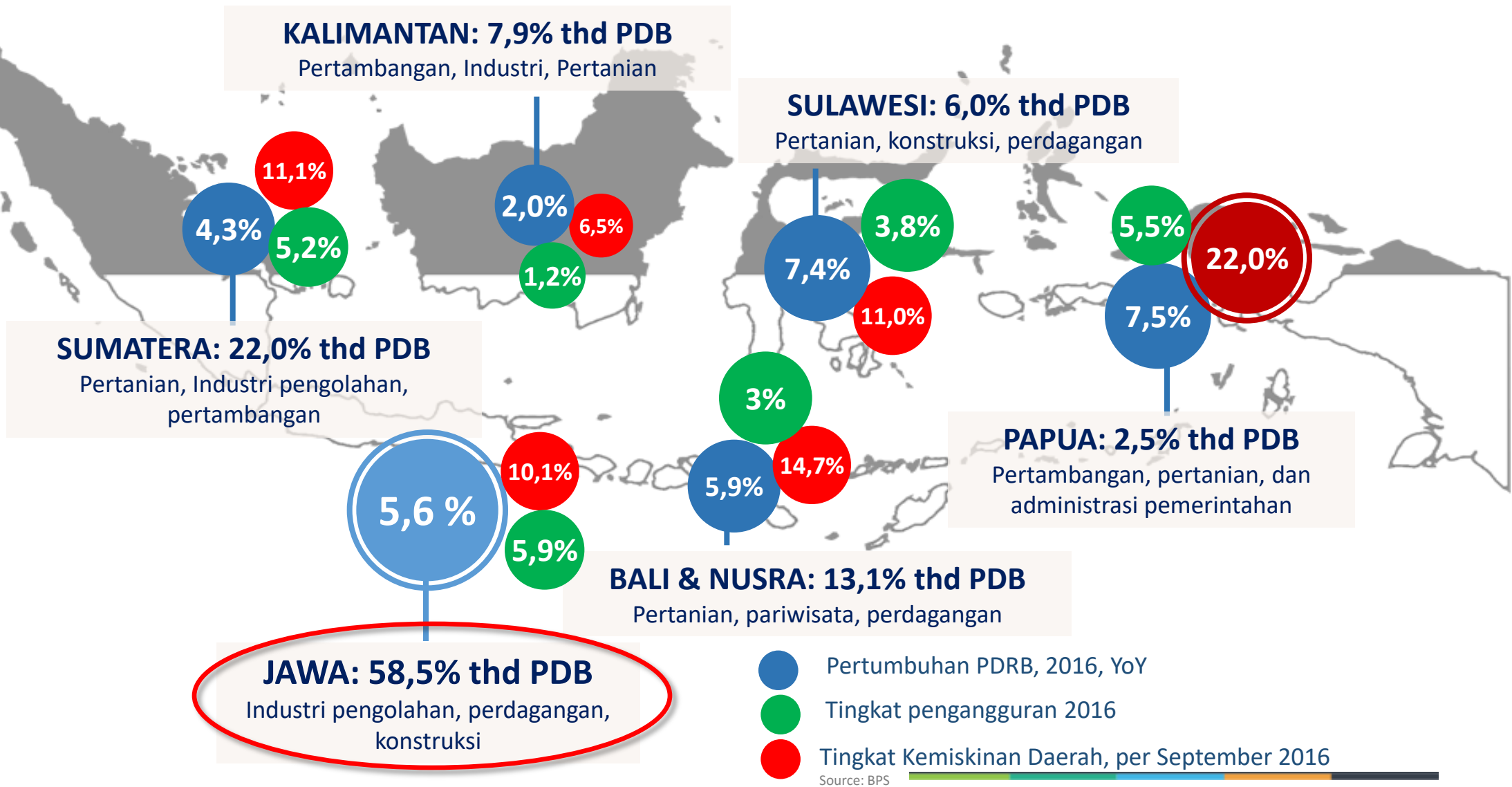


Kaya Pajak

**TRANSFER KE DAERAH SEBAGAI TRANSFER IMBALANCES
(DBH, DAU, DAK, DANA DESA)**



Ketimpangan secara horizontal masih terjadi, sumber pertumbuhan masih bertumpu pada kawasan barat, Tingkat Kemiskinan dan Tingkat Pengangguran tertinggi di Jawa dan Sumatera.

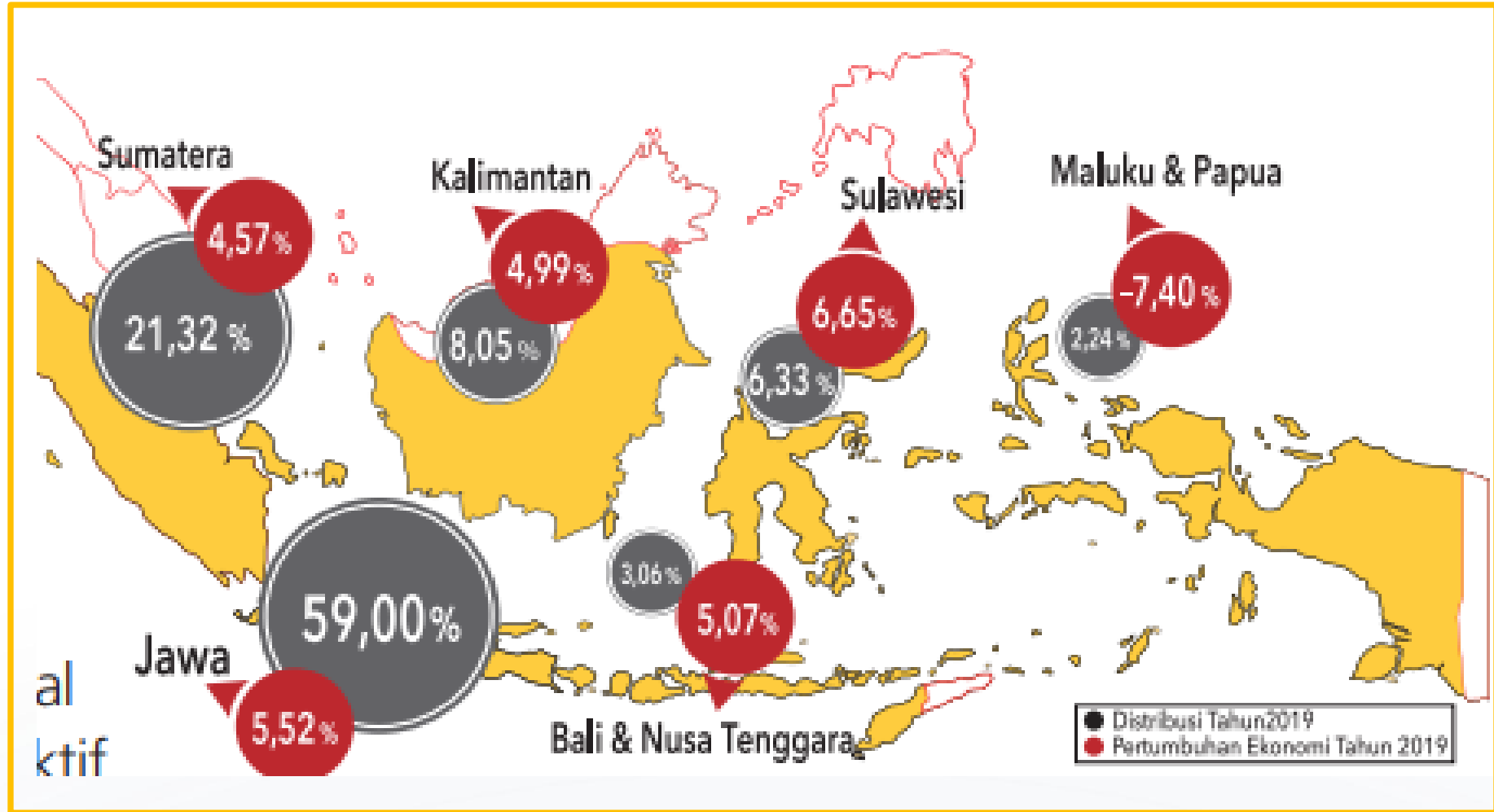


Ketimpangan masih terjadi hingga 2019.....



PEREKONOMIAN INDONESIA SECARA SPASIAL 2019

Ketimpangan secara horizontal masih tetap terjadi, sumber pertumbuhan masih bertumpu pada kawasan barat, Tingkat Kemiskinan dan Tingkat Pengangguran tertinggi di Jawa dan Sumatera.





PEMETAAN DAERAH

$$Share = \frac{(PAD + DBH)}{\text{Total Belanja}} \times 100\%$$

Kemandirian Daerah

PAD : Pendapatan Asli Daerah
DBH: Dana Bagi Hasil

$$Growth = \frac{(PAD + DBH)_t - (PAD + DBH)_{t-1}}{(PAD + DBH)_{t-1}} \times 100\%$$

Prospek Ekonomi Daerah

$(PAD+DBH)_t$: PAD dan DBH tahun saat ini

$(PAD+DBH)_{t-1}$: PAD dan DBH tahun sebelumnya



KUADRANISASI DAERAH

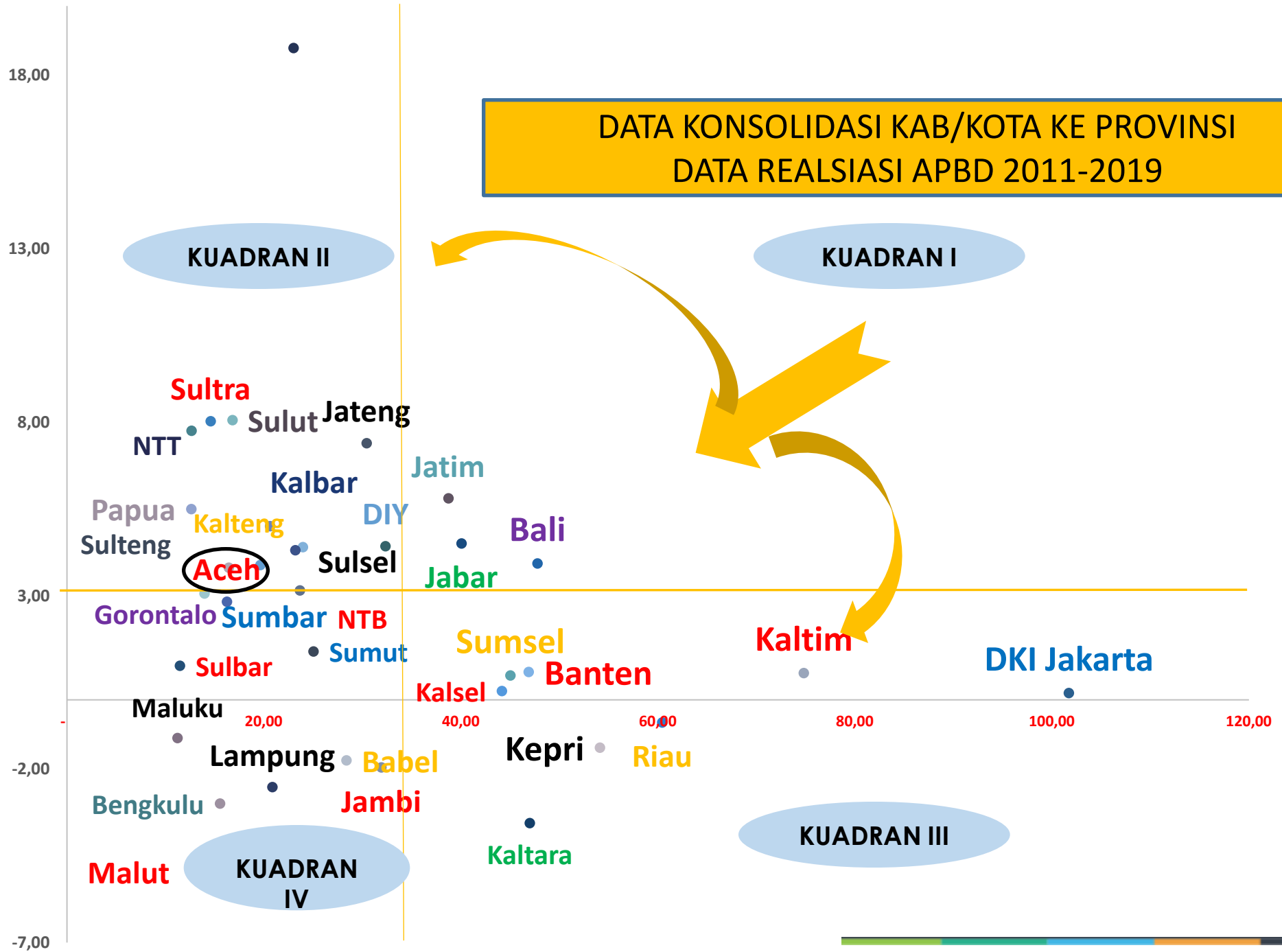


KUADRAN I → daerah idaman menggambarkan kondisi *share* dan *growth* tinggi;

KUADRAN II → daerah dengan *share* masih rendah namun memiliki *growth* yang tinggi;

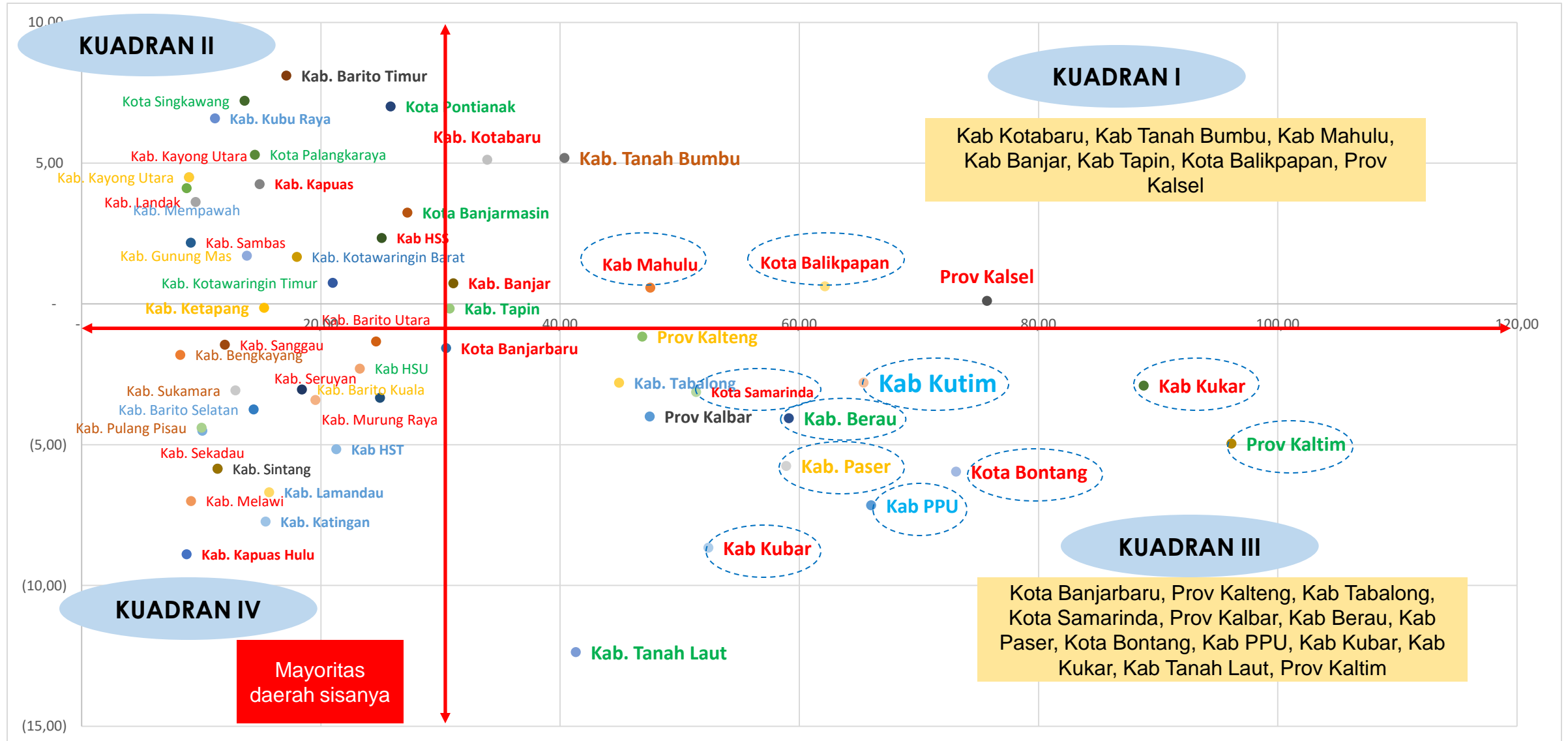
KUADRAN III → daerah dengan *share* tinggi namun *growth* negatif;

KUADRAN IV → daerah dengan *share* dan *growth* relatif rendah;



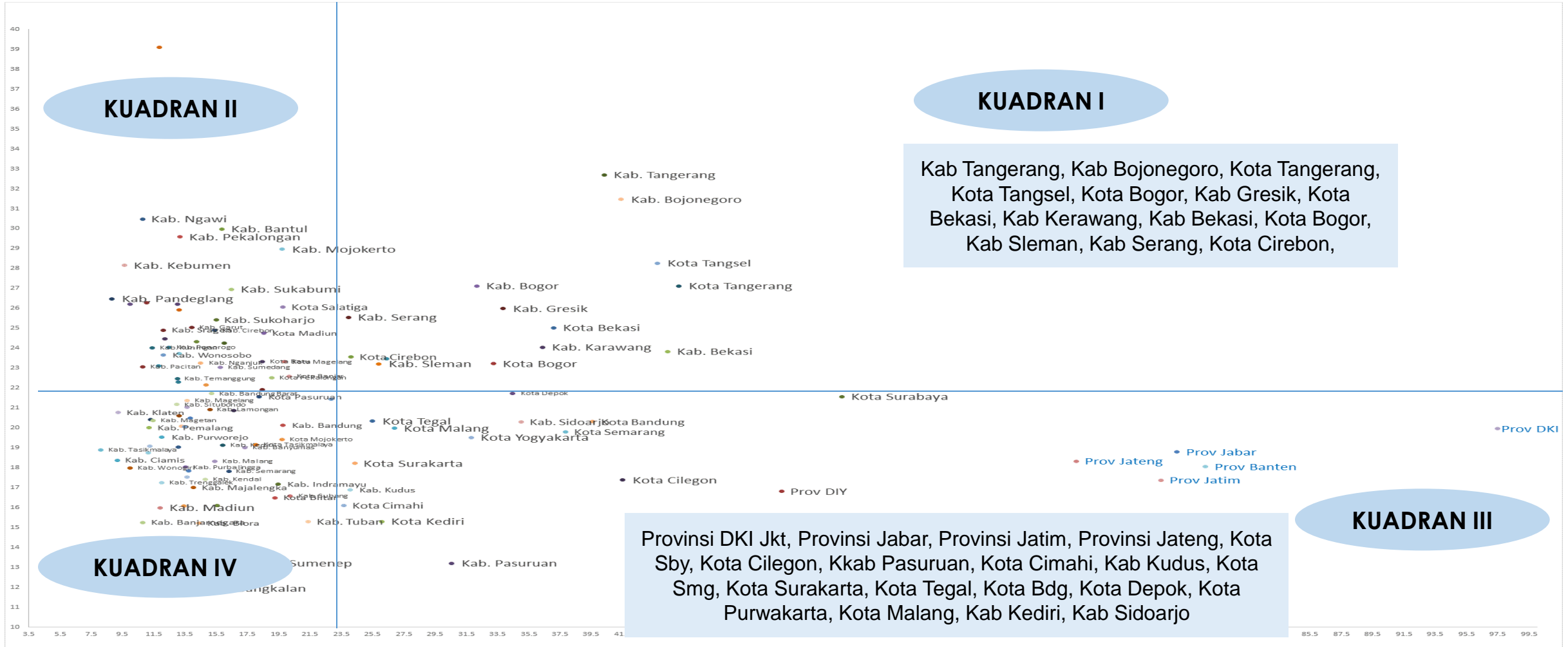


KUADRANISASI DAERAH SE-KALIMANTAN



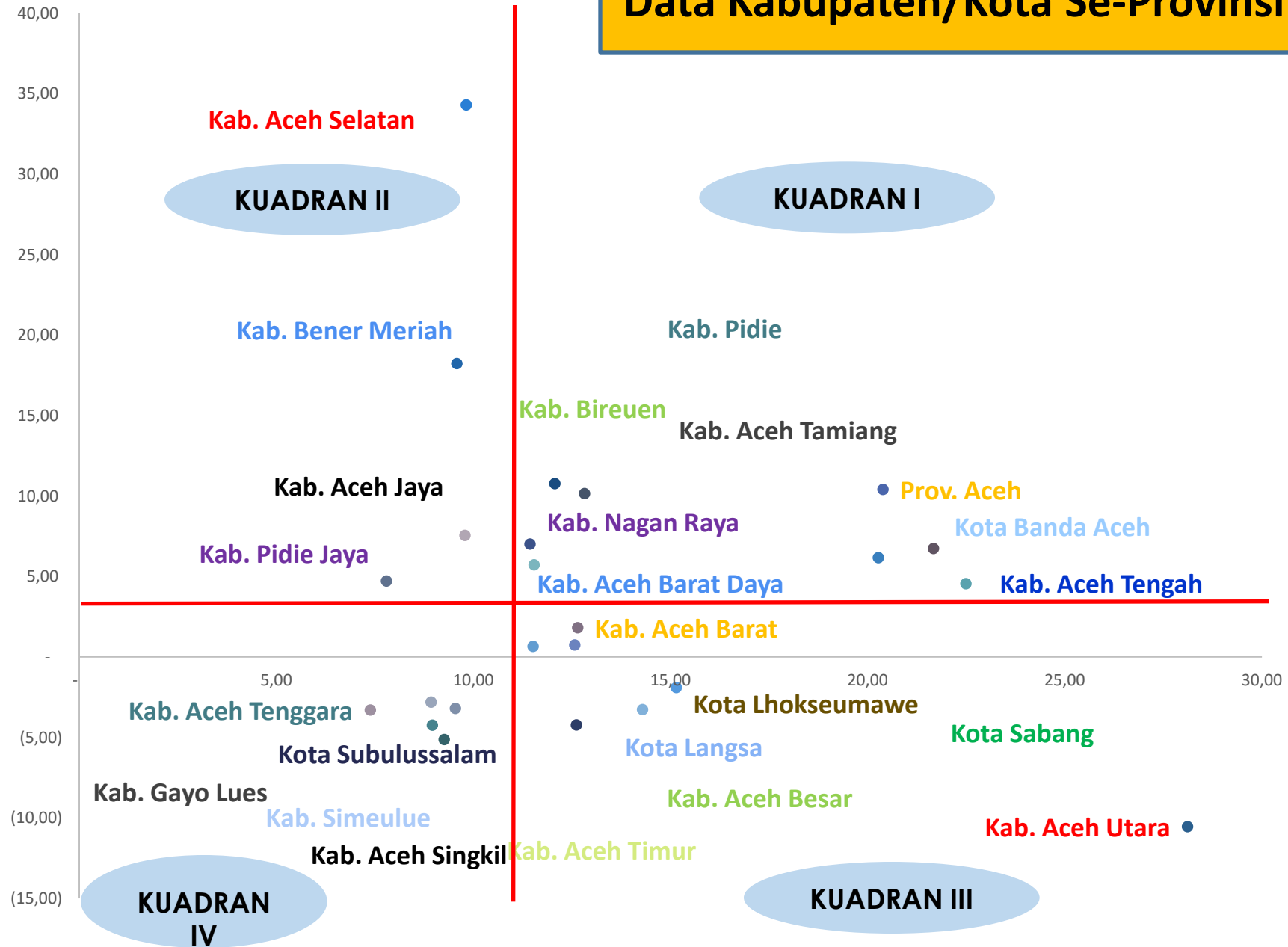


KUADRANISASI DAERAH SE-JAWA



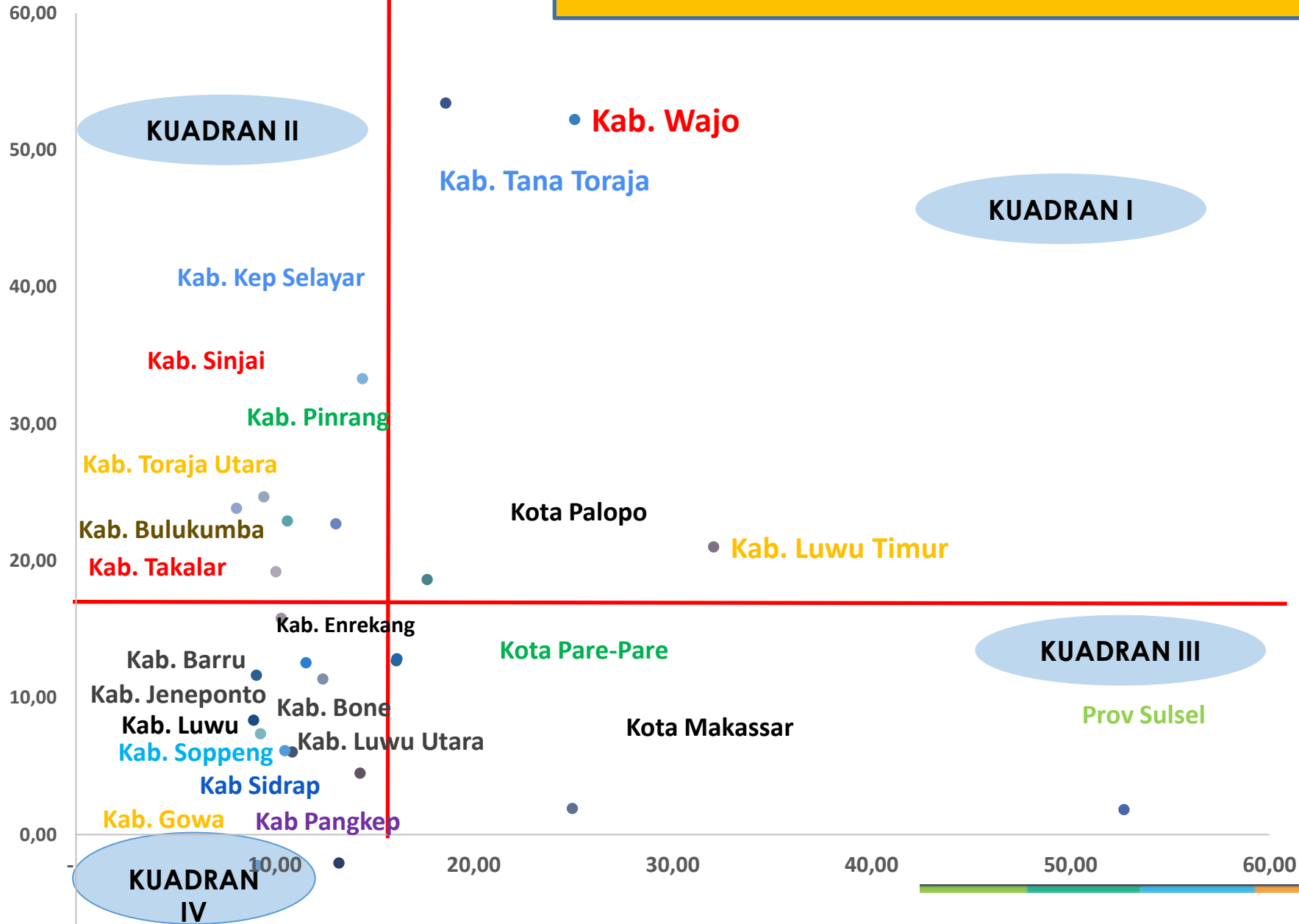


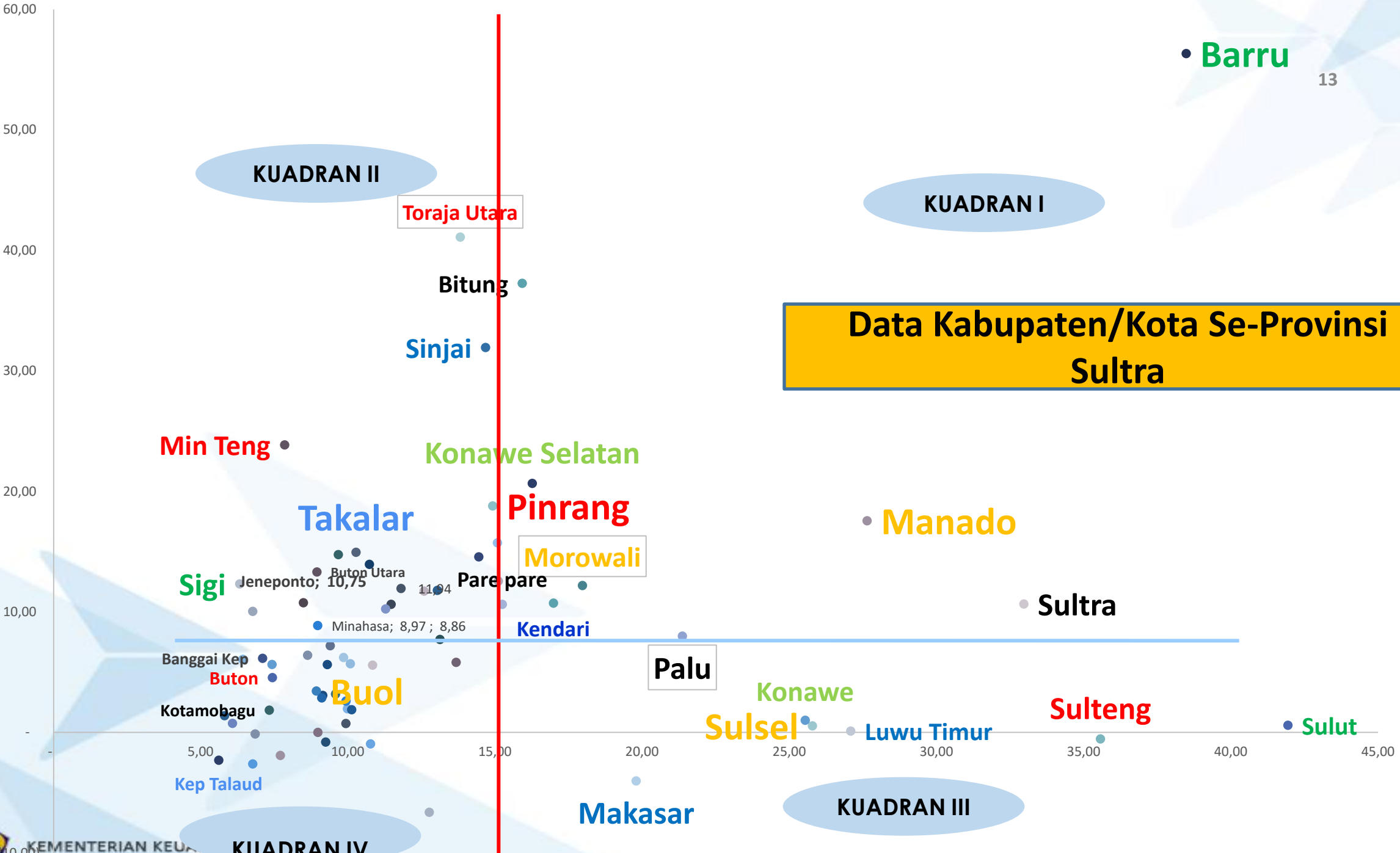
Data Kabupaten/Kota Se-Provinsi Aceh





Data Kabupaten/Kota Se-Provinsi Sulsel







REGULASI DAERAH

1

UU 28/2002 → Bangunan Gedung

2

PP 36/2005 → Peraturan Pelaksanaan Bangunan Gedung

3

Permen PU 29/PRT/M/2006 → Syarat Teknis Bangunan Gedung

4

Permen PU 05/PRT/M/2007 → Pedoman Sertifikat Laik Fungsi



REGULASI



1

Permen PUPR 02/PRT/M/2015 → Bangunan Gedung Hijau

2

Permen PUPR 05/M/2016 → Ijin Mendirikan Bangunan

3

Perda DKI 7/2010 → Bangunan Gedung

4

Pergub 38/2012 → Bangunan Hijau



BANGUNAN HIJAU

Bangunan gedung yang bertanggung jawab terhadap lingkungan dan sumber daya

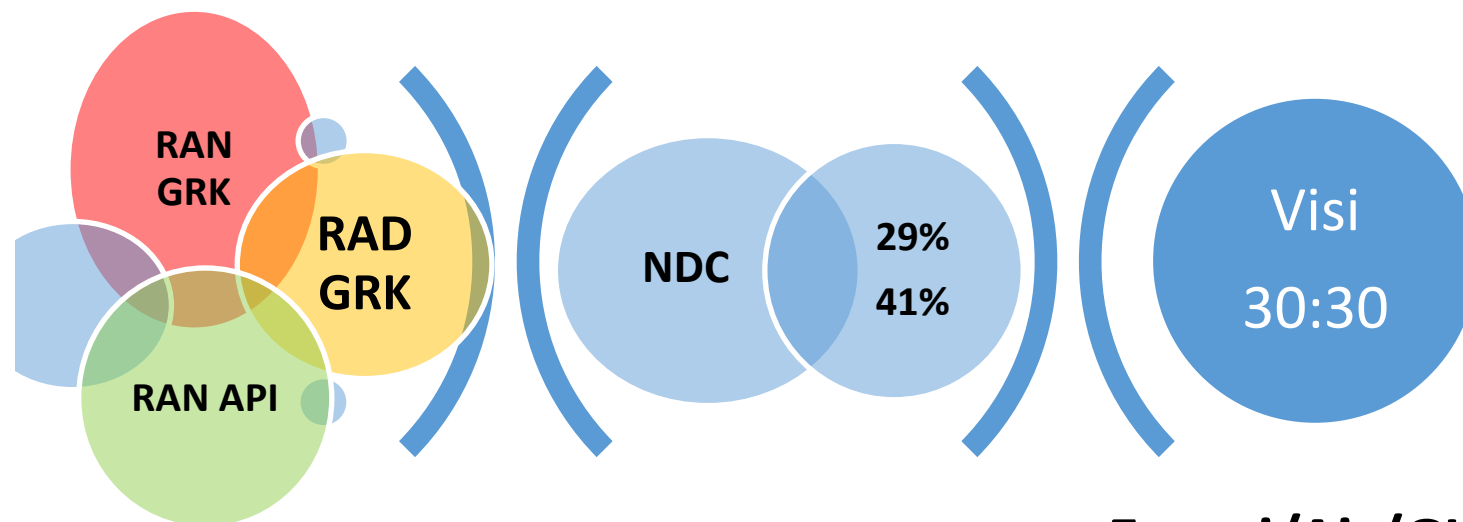
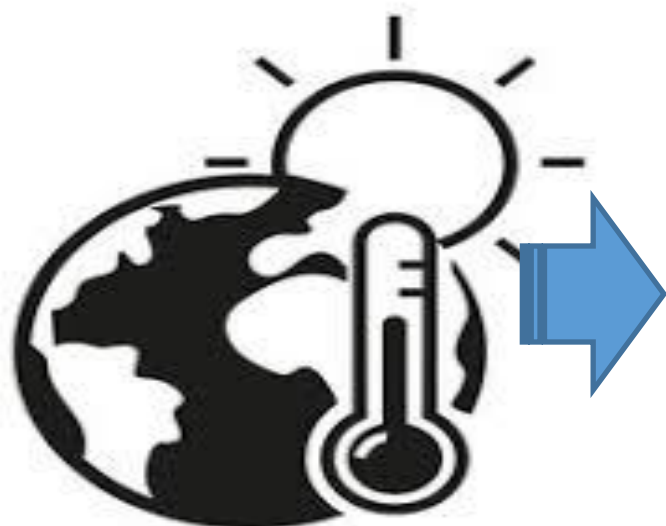
Efisien sejak perencanaan, pelaksanaan konstruksi, pemanfaatan, pemeliharaan, hingga de-konstruksi

Bangunan gedung terdiri dari bangunan gedung baru dan gedung eksisting

****Gedung baru sdg tahap perencanaan sementara gedung eksisting adalah gedung sdg tahap konstruksi dan atau sudah tahap pemanfaatan**

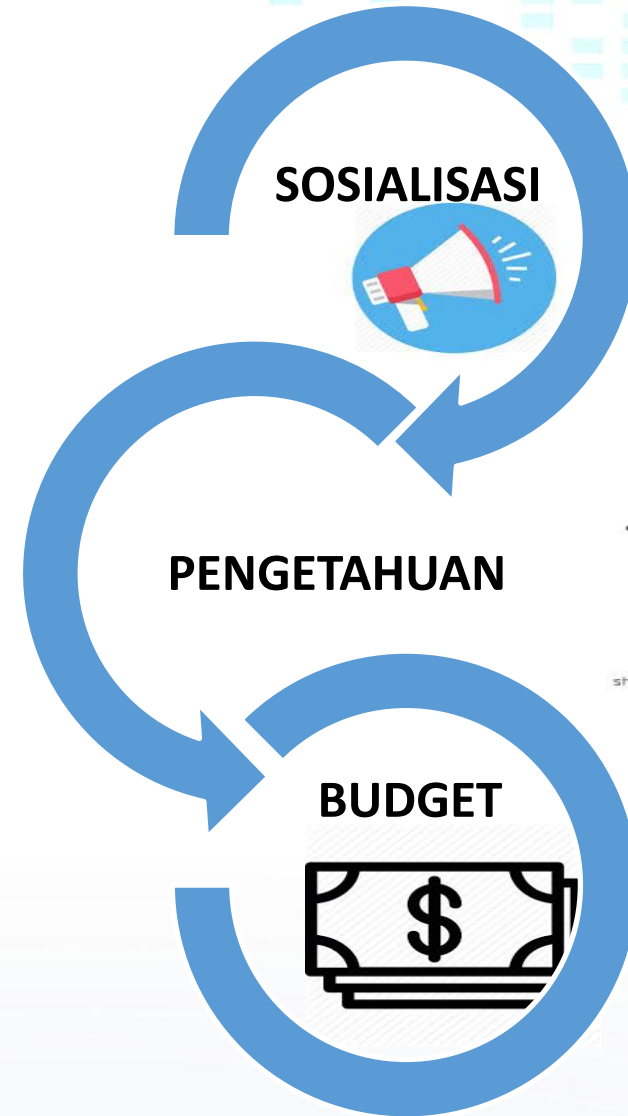
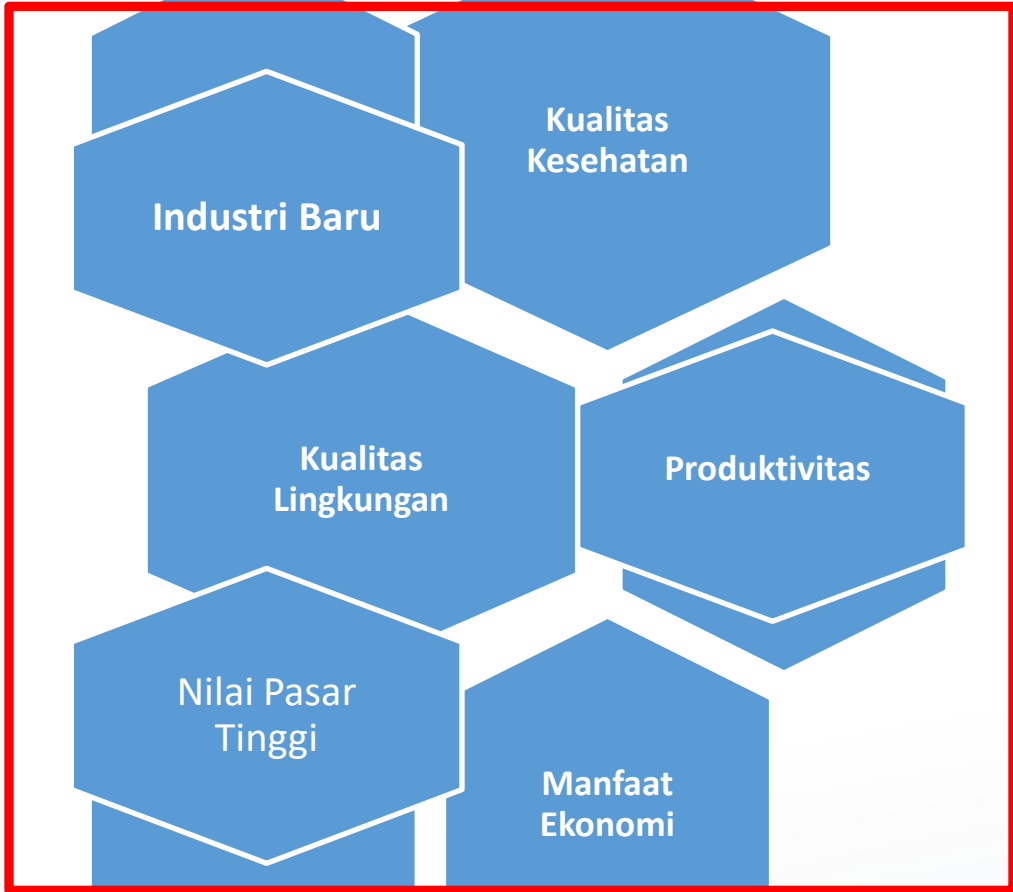


KOMITMEN REDUKSI GHG



Energi/Air/GHG
DAERAH





shutterstock.com • 741779038



LOKUS PERHATIAN



Hunian/Rusun > 50.000

M²



Hotel > 20.000

M²



Kantor/Kg usaha > 50.000

M²



Gedung sosbud > 20.000

M²

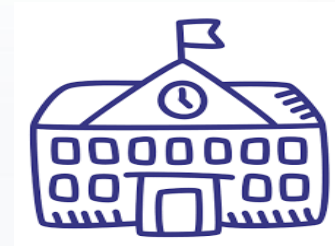


Kg usaha/perdagangan > 50.000

M²



Gedung multi kg > 50.000



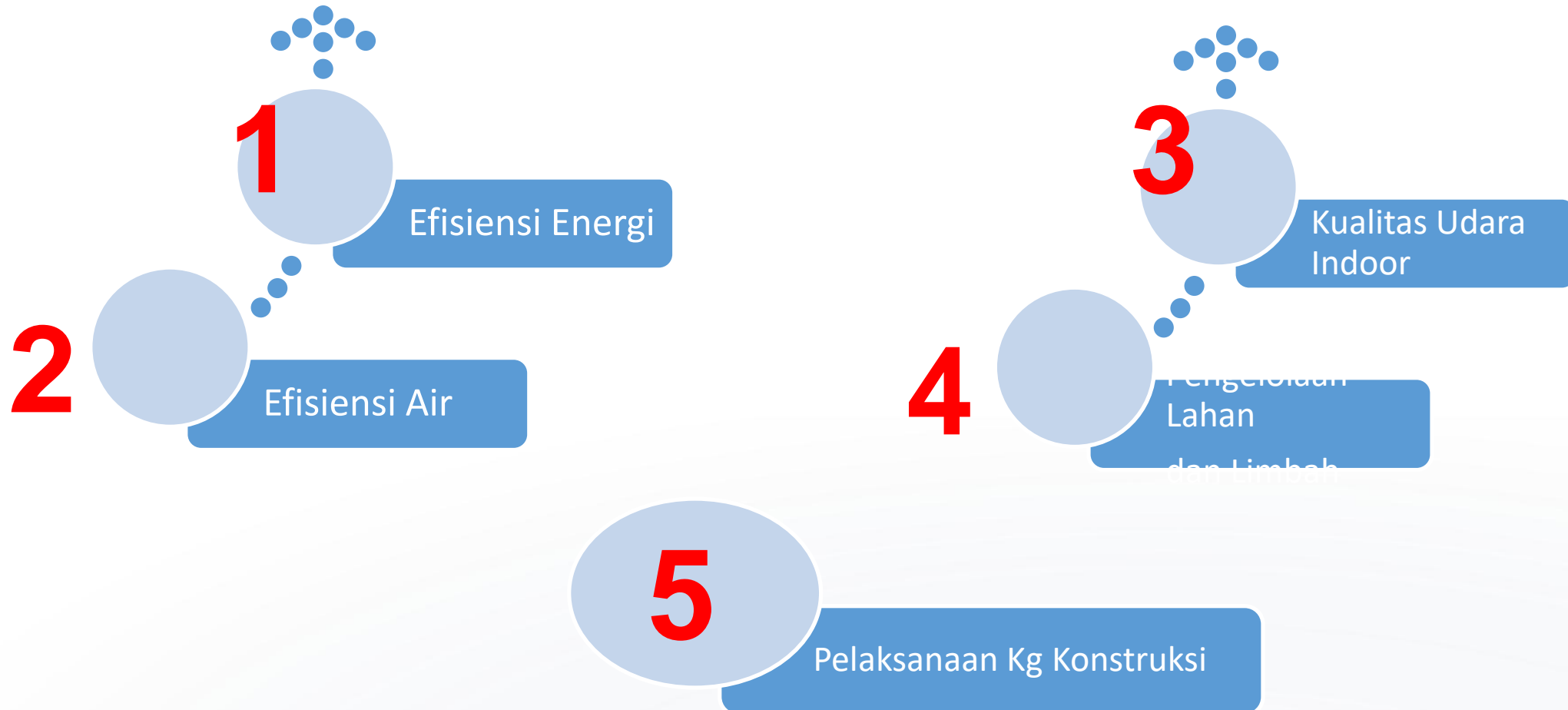
M²

Gedung pendidikan > 10.000

M²

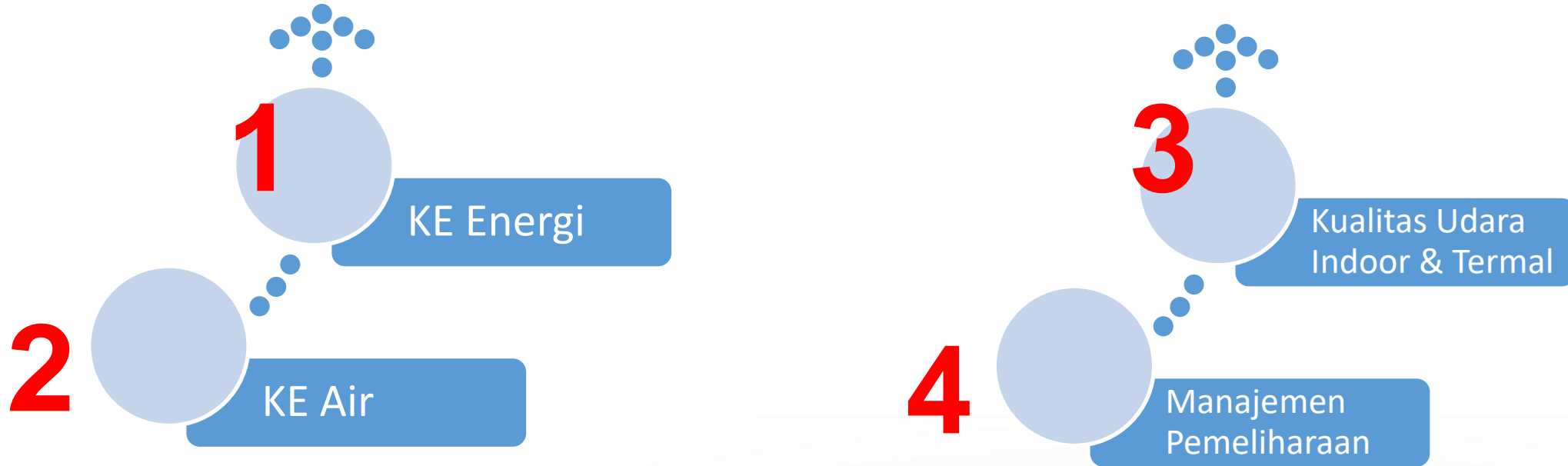


SYARAT TEKNIS BANGUNAN HIJAU BARU





SYARAT TEKNIS BANGUNAN HIJAU EKSISTING





PP No 24/2019

Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah

Berdasarkan prinsip kepastian hukum, kesetaraan, transparansi, akuntabilitas dan efektif efisien

Pemda dpt memberikan insentif dan/atau kemudahan investasi kd masy atau investor

Kriteria: kontribusi peningkatan pendapatan masyarakat, menyerap naker, SD lokal, PDRB, berwawasan LH, industri pionir, UMKM, beriontasi ekspor



Berbagai Jenis Insentif



Pengurangan, keringanan, pembebasan pajak daerah (PBB/BPHTB)



Pengurangan, keringanan, pembebasan retribusi daerah



Pemberian bantuan modal kepada UMKM dan koperasi



Bantuan riset pengembangan UMKM dan koperasi



Bantuan fasilitas pelatihan vokasi UMKM



Bunga pinjaman rendah



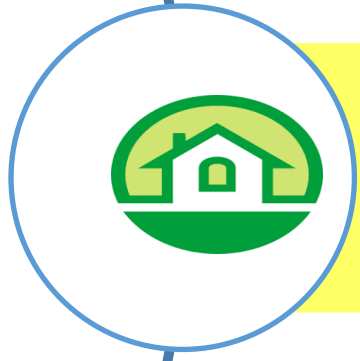
Berbagai Jenis Kemudahan



Penyediaan data info peluang investasi



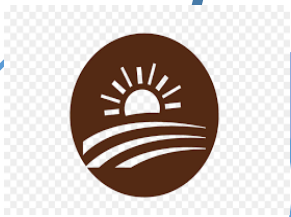
Bantuan teknis



Penyediaan sarana dan prasarana



Penyederhanaan dan percepatan pemberian perijinan satu pintu (IMB/SLF)



Fasilitasi penyediaan lahan/lokasi



Kemudahan langsung konstruksi



Kenyamanan investasi di daerah



Kemudahan di kawasan strategis



REKOMENDASI INDUSTRI



Harga Properti Hijau Lebih Mahal



Bantuan dana pembayaran konsultan



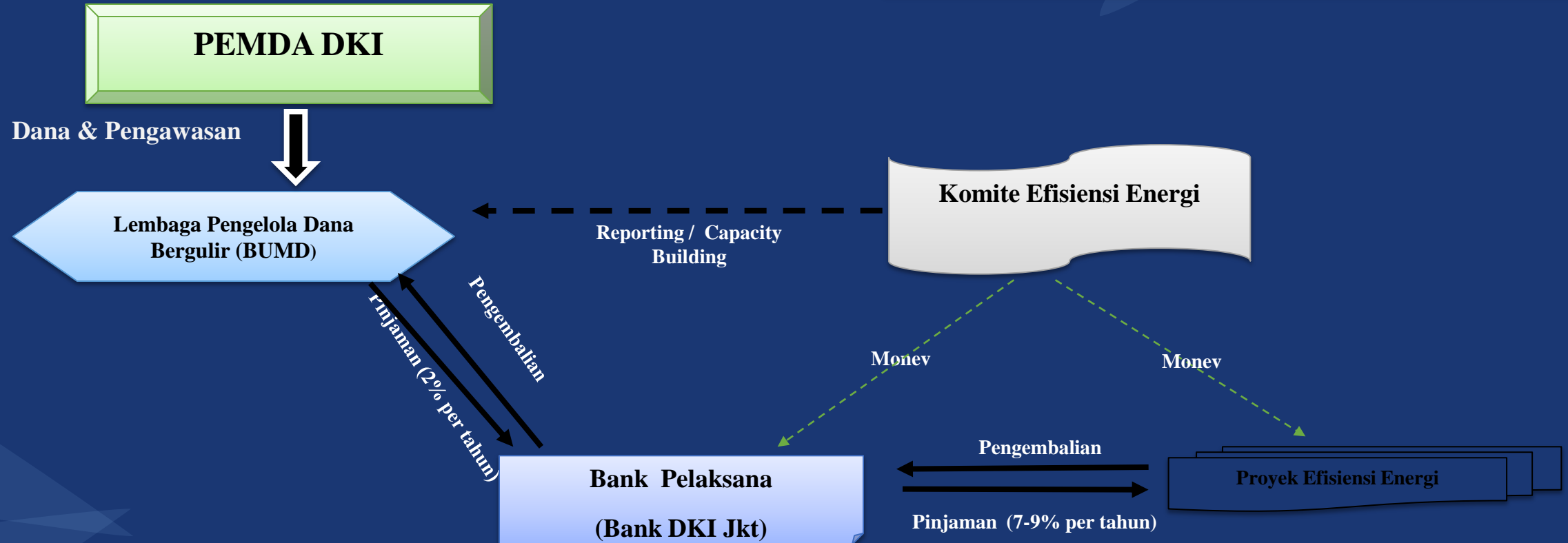
Law enforcement



BERBAGAI SIMULASI



Usulan Mekanisme Dana Bergulir Efisiensi Energi





INSENTIF PBB

**UU Nomor 28/2009 ttg PDRD

Pasal 79

- Dasar PBB adalah NJOP
- Penetapan NJOP oleh Kepala Daerah

Pasal 80

Tarif PBB
paling tinggi
0,3%

Pasal 81

Besaran pokok
PBB : tarif x
NJOP – NJOP
TKP



\$POTENSI INSENTIF
via tariff optimal dan minimal





INSENTIF BPHTB

**UU Nomor 28/2009 ttg PDRD

Pasal 85

- Obyek BPHTB adalah perolehan hak
- Dasar nya NPOP

Pasal 88

Tarif BPHTB
paling tinggi
5%

Pasal 81

Besaran pokok
PBB : tarif x
NPOP – NPOP
TKP



\$ POTENSI INSENTIF
via tariff optimal dan minimal



KEMENTERIAN KEUANGAN

Terima Kasih

